



**ILMU-ILMU SOSIAL PADA
ERA INDUSTRIALISASI DALAM KONTEKS
PEMBANGUNAN NASIONAL**

PIDATO PENGUKUHAN

Diucapkan pada peresmian penerimaan Jabatan Guru Besar
Tetap pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro Semarang
Rabu, 2 Agustus 1989

Oleh:
Hartojo

ILMU-ILMU SOSIAL PADA ERA INDUSTRIALISASI DALAM KONTEKS PEMBANGUNAN NASIONAL

Hadirin yang saya muliakan.

Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkahNya yang dilimpahkan pada saya, sehingga dapat mengucapkan pidato pengukuhan di hadapan hadirin yang saya muliakan.

I

Hadirin yang saya muliakan.

Kalau kita perhatikan ilmu-ilmu sosial yang ada di Indonesia, ternyata pada umumnya telah didorong oleh perkembangan ekonomi dan pada khususnya oleh rekayasa sosial. Hal ini berarti bahwa bukan saja teori yang menentukan praktek, tetapi praktekpun dapat menentukan teori ilmu pengetahuan; bukan hanya terhadap nilai dan ideologi tidak bisa bersikap netral, tetapi ilmu pengetahuanpun tidak dapat bersikap netral terhadap praktek dan kepentingan praktis. Begitu pula kalau kita perhatikan pengalaman negara-negara berkembang, ternyata teori yang menentukan praktek, tetapi praktekpun menentukan teori, kepentingan menentukan ilmu pengetahuan dan dinamika, tetapi hal itu tidak bisa diharapkan mengatur perkembangannya sendiri, melainkan menentukan suatu perencanaan teknis dan politis.

Kenyataan ini senada dengan epistemologi baru dari Juergen Habermas, pada essaynya yang terkenal: "Erkenntnis und Interesse" dalam bukunya "Technik und Wissenschaft als Ideologie" yang memperlihatkan hubungan antara kepentingan/ideologi dan ilmu pengetahuan, serta sifat niscaya hubungan tersebut. Hal ini berarti, bahwa tidak ada satu jenis ilmu pengetahuan yang bebas dari kepentingan yang mendasarinya. Justru kepentingan inilah yang menentukan asal-

mula dan sifat suatu ilmu pengetahuan dan bukan sebaliknya. Dengan demikian kepentingan teknis telah menghasilkan ilmu pengetahuan alam dan ilmu-ilmu sosial positif-empiris, juga membuat ilmu-ilmu itu menjadi bagian dari kekuatan produktif. Kepentingan-kepentingan praktis menghasilkan ilmu-ilmu humaniora dan ilmu-ilmu sosial simbolik yang membuatnya menjadi bagian dari kekuatan-kekuatan komunikatif yang membantu memajukan interaksi sosial. Kepentingan emansipatoris menghasilkan ilmu-ilmu sosial kritis yang membuatnya suatu bagian dari kekuatan-kekuatan reflektif yang pada akhirnya akan membebaskan manusia dari kesadaran palsu, yang mengalami distorsi sistematis oleh kekuasaan (Ignas Kleden, 1987).

Adalah penting sekali untuk membuka kembali motif-motif tersembunyi yang mempengaruhi ilmu pengetahuan, yaitu seberapa jauh peranan motif kepentingan itu dalam proses kognitif kita, seberapa jauh interes praktis membimbing/menyesatkan kesadaran kita. Ilmu pengetahuan adalah hasil kreasi manusia yang langsung dipengaruhi oleh situasi yang dialaminya dalam sejarah. Kecenderungan a-historis dari suatu ilmu pengetahuan adalah awal proses pemandulan ilmu pengetahuan.

Menurut Juergen Habermas dalam kritik ideologinya, ada 3 kegiatan utama yang langsung mempengaruhi dan menentukan bentuk tindakan dan bentuk pengetahuan manusia, yaitu: kerja, komunikasi/interaksi dan kekuasaan. Kerja dibimbing oleh interesse yang bersifat teknis. Interaksi dibimbing oleh interesse yang bersifat praktis. Kekuasaan dibimbing oleh interesse yang bersifat emansipatoris. Tiga interesse ini mempengaruhi pula proses terbentuknya ilmu pengetahuan, yaitu ilmu-ilmu yang termasuk dalam kelompok empiris-analitis, kelompok ilmu historis - hermeneutis dan kelompok ilmu sosial kritis: ekonomi, sosiologi, politik (Ignas Kleden, 1987; Richard J. Bernstein, 1978).

Dalam ilmu sosial yang paling majupun, seperti ilmu ekonomi dapat diperoleh contoh-contoh adanya fungsi laten dalam teori-teori Gunnar Myrdal (1980) telah menyingkapkan kenyataan bahwa dalam berbagai teori ekonomi-khususnya ekonomi klasik-tersembunyi suatu "pesan" suatu fungsi laten, suatu ideologi yang hendak mempertahankan sistem yang ada (Ignas Kleden 1987). Bahkan dalam teori "Ideological Scientific" dinyatakan dengan tegas, bahwa tidak ada teori yang obyektif sungguh-sungguh, tetapi selalu mempunyai implikasi ideologi tertentu (Graham C. Kinloch, 1977).

Berkaitan dengan analisa di atas, perlu diajukan suatu masalah yang menyangkut peranan sosial para ahli ilmu sosial, yaitu apakah seseorang ilmuwan sosial hanya menyelidiki dan menjelaskan kenyataan sosial yang ada, atau dia juga harus menganut suatu nilai yang ada, atau dia juga harus menganut suatu nilai yang harus diperjuangkan?

Menanggapi masalah ini, secara garis besar, terdapat 2 pandangan diantara para ilmuwan.

Yang pertama berpendapat, bahwa harus diadakan pemisahan antara tanggung jawab ilmiah dan tanggung jawab sosial. Sebagai seorang warga negara dapat saja membela suatu nilai tertentu, yang berarti pada saat itu ia tidak bertindak atas wewenangnya sebagai seorang ilmuwan.

Yang kedua menyatakan, bahwa pendirian yang membedakan tanggung jawab ilmiah dan tanggung jawab politik hanyalah salah satu pendirian yang sampai sekarang banyak yang menganutnya, tetapi sebetulnya hanya merupakan hasil dari suatu perkembangan historis tertentu, berarti dapat dipersoalkan kembali berdasarkan pendirian lainnya. Jika kenyataan sosial dihadapi dengan suatu tanggung jawab sosial politik tertentu, maka ilmuwan sosial tidak hanya menjelaskan secara netral melainkan mempertanyakan apakah struktur sosial yang ditelitinya perlu dipertahankan atau harus diubah (Ignas Kleden, 1987).

II.

Para hadirin yang saya muliakan.

Seperti kita ketahui bersama, Pancasila sudah diterima bangsa Indonesia sebagai satu-satunya asas yang perlu dihayati dan diamalkan, karena mengemban tugas ke depan, yaitu mengemban tugas sejarah untuk membangun masa depan, yang merupakan langkah-langkah bertahap dan berkesinambungan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Tugas sejarah ini merupakan:

- a. menanamkan nilai-nilai kepribadian dalam pembangunan.
- b. dalam pergantian generasi kesinambungan dalam penanaman nilai-nilai yang menjadi cita-cita kemerdekaan kepada generasi yang lebih muda yang sangat menentukan bagi kelestarian Pancasila.
- c. dalam babak-babak pembangunan yang berkesinambungan, dasar-dasar Pancasila makin kuat dalam pembangunan sosial, ekonomi dan politik.
- d. perkembangan dunia yang cepat dan mendasar serta berpacunya pembangunan bangsa, penghayatan dan pengamalan Pancasila tidak dapat diabaikan, sehingga penyusupan ideologi asing, baik secara langsung/tidak langsung dapat dicegah.
- e. perwujudan Pancasila sebagai panggilan sejarah mengakibatkan bangsa Indonesia perlu memiliki kesatuan bahasa, kesatuan pandangan dan kesatuan gerak langkah dalam penghayatan dan pengamalan Pancasila yang akan menemukan kita bersama dalam mewujudkan Pancasila dalam kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan secara nyata.

Dalam hal ini, perlu pula diperhatikan sambutan mantan menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Dr. Nugroho Notosoesanto almarhum, pada penyelenggaraan Penataran P-4, dalam rangka introduksi mahasiswa baru U.I., 26 Juli 1983, yang

mengatakan mengenai perlunya diadakan pemantapan ideologi dikalangan Civitas Akademica Perguruan Tinggi. Karena sejak Daniel Bell pada tahun 1960, menulis buku: "The End of Ideology" ada juga sarjana-sarjana ilmu sosial Indonesia yang serta-merta berpendapat, bahwa juga di negeri kita, tidak perlu ada ideologi lagi.

Tetapi pada tahun 1974, Bell menulis buku lain dengan judul: "The Coming of Post Industrial Society: A Venture in Social Forecasting", terungkap pandangan bahwa bagaimanapun juga sesuatu bentuk ideologi itu perlu bagi Amerika Serikat.

Terlepas dari persoalan orang Amerika, kita dapat mensinyalir, bahwa justru untuk suatu masyarakat berkembang, ideologi sebagai faktor stabilisasi dan keseimbangan, mutlak perlu.

Ideologi sebagai gagasan sentral suatu bangsa mempunyai pedomannya menentukan untuk mencegah desintegrasi sosial atau anarki nasional, sebab integrasi nasional, kesatuan dan persatuan merupakan syarat mutlak bagi pembangunan nasional. Dengan demikian pemantapan ideologi Pancasila di lingkungan Perguruan Tinggi bersifat menentukan, dan sejauh mungkin harus dicegah berkecamuknya kesenjangan-kesenjangan komunal akan kesenjangan ideologis di antara elite kita.

Di dalam lingkungan kampus ada 2 ideologi modern yang pengaruhnya cukup besar dan yang merupakan ancaman atau setidak-tidaknya hambatan bagi usaha memasyarakatkan Pancasila sebagai ideologi modern.

Dalam masyarakat kita dan dalam lingkungan R.I. kedua ideologi itu pernah secara formal dianut pada dua periode terdahulu dalam sejarah politik Indonesia.

Ideologi Liberalisme pengaruhnya terasa secara langsung melalui perkuliahan dan pembacaan di bidang ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu budaya. Dominasi textbook yang bertolak dari filsafat Liberalisme masih belum tergoyahkan dalam bidang ilmu-ilmu sosial, sedang textbook yang dituliskan oleh sarjana-

sarjana Indonesia belum memperlihatkan pembebasan dari filsafat Liberalisme.

Mengenai ideologi Marxisme apalagi Marxisme-Leninisme, orang jarang bicara. Tetapi salah satu aspeknya yaitu kontradiksi, cukup sering ditiup-tiupkan di dalam kampus, dalam pergaulan antara Civitas Akademica yang tentunya dalam tatanan yang bersemangat kekeluargaan, kontradiksi antara sesama anggota keluarga, tidak sesuai.

Maka jelaslah juga untuk kehidupan sehari-hari dalam kampus, kesadaran mengenai nilai-nilai Pancasila, sangatlah perlu. Ternyata masih ada yang kurang menyadari secara tajam, bahwa Pancasila bersifat kekeluargaan, seperti terlihat dalam pasal 33 U.U.D. '45 serta penjelasannya.

Kepada para mahasiswa diserukan bagi persiapan menjadi kader Rakyat, Bangsa dan Negara Pancasila serta mulai sekarang bersikaplah sebagai kader yang dapat diandalkan: tangguh dalam sikap, teguh dalam pendirian, kukuh dalam keyakinan ideologi Pancasila.

Disamping sambutan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, perlu pula diperhatikan sambutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Dr. Fuad Hasan pada pembukaan Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional IV, Jakarta, 8-12 Sept - 1986 yang menyatakan, bahwa upaya mewujudkan amanat untuk mengisi kehidupan kebangsaan yang merdeka dan berdaulat atas eksistensinya sendiri itu bukanlah hal yang bebas nilai (value-free). Sebaliknya, bahkan kita menegaskan suatu konsensus ideologis yang berpedoman pada Pancasila serta komitmen konstitusional pada U.U.D. '45. Bahkan tidak berlebihan untuk memberikan karakteristik pada upaya pembangunan nasional itu sebagai gerakan yang justru berorientasi pada sistem nilai (value oriented movement).

Mengingat hal itu, maka mustahil misalnya kita melaksanakan pembangunan nasional yang berkelanjutan atau kesudahannya akan berakibat dehumanisasi karena hal demikian itu jelas bertentangan dengan sila "Kemanusiaan yang adil dan beradab".

Kita juga tentu akan waspada terhadap kemungkinan terjadinya despiritualisasi kehidupan manusia Indonesia sebagai akibat pembangunan fisik dan material, karena hal itu dalam analisa akhirnya akan menggoyahkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini berarti bertentangan dengan sila "Ketuhanan Yang Maha Esa". Begitulah seterusnya dengan nilai-nilai Pancasila sebagai keseluruhan yang menjadi landasan orientasi dalam gerak maju kita melalui pembangunan nasional.

Jika kita sependapat bahwa pembangunan nasional kita adalah suatu gerakan yang berorientasi pada nilai, suatu "value oriented movement", maka setiap perkembangan yang cenderung menuju situasi bebas nilai harus diwaspadai dan dihindari jauh-jauh hari. Itulah sebabnya kita juga jangan sekedar terpesona terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan juga berusaha keras menguasainya sejauh mungkin dan senantiasa berpijak pada bumi dan kebudayaan kita sendiri.

Dengan demikian kita tidak akan mudah tergelincir dan menjadi sekedar "pemamah biak" dari berbagai menu ilmu pengetahuan dan teknologi yang berasal dari bumi dan kebudayaan asing, kemudian gerak perubahan yang melibatkan kita akan menjadikan kita terombang-ambing ibarat layang-layang putus talinya.

Mempertimbangkan segala implikasi dari penyertaan peran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan nasional itu, maka pada kita terpikul beban etis yang utama, yaitu tetap mempertahankan martabat manusia Indonesia sebagai titik sentral yang paling berkepentingan atas pening-

katan kualitas hidupnya sebagai eksistensi yang merdeka, yang produktif dan kreatif.

Para ilmuwan Indonesia perlu semakin menebalkan kepercayaan pada diri sendiri dan juga integritasnya sebagai ilmuwan yang bangga terhadap apa yang dihasilkannya sebagai prestasi ilmiah di bidangnya, baik secara mandiri maupun dalam bentuk kerjasama kolegal serta interdisipliner. Disamping itu, ilmuwan Indonesia seyogianya menghayati dirinya sebagai bagian yang hidup dari masyarakat dan kondisi Indonesia; bukan mengukur sesamanya dengan masyarakat dan kondisi asing.

III

Hadirin yang saya muliakan.

Hal yang menarik, baik dalam ilmu sosial maupun ilmu kebudayaan secara akademis, dan penting secara politis adalah hubungan antara nilai dan ilmu pengetahuan. Para ilmuwan sempat terpancing untuk "berkeleahi" mengenai masalah: "apakah ilmu sosial itu bebas nilai atau tidak bebas nilai; apakah ilmu sosial hanya berupa suatu sistem pengetahuan atau sekaligus juga suatu sistem nilai; apakah ilmu sosial telah lahir dari dorongan, hasrat ingin tahu semata-mata atau oleh suatu jenis kepentingan dan dorongan pamrih tertentu?" (Ignas Kleden, 1987).

Terhadap masalah-masalah ini, Juergen Habermas telah menjawabnya agak tuntas (Richard J. Bernstein, 1987).

Pembicaraan mengenai ilmu sosial itu bebas nilai atau tidak bebas nilai, Max Weberlah pelopornya. Dikatakannya, bahwa ilmu sosial harus bebas nilai. Pendapat yang demikian menurut Alvin W. Gouldner, masih dipandang oleh banyak ahli sosiologi sebagai tempat yang suci. Mereka dalam memahami ilmu sosial itu bebas nilai dan mempercayainya secara dogmatis. Mereka sesungguhnya tanpa menyelidiki secara serius dasar

berpijaknya, tanpa mempunyai idea yang jernih terhadap apa yang dimaksudnya itu.

Pandangan Weber mengenai hubungan antara nilai dan ilmu sosial hampir identik dengan apa yang dipegang oleh beberapa orang dewasa ini.

Kebutuhan akan konsepsi ilmu sosial itu bebas nilai diperlukan untuk melayani kebutuhan pribadi maupun institusi.

Secara singkat dapat dikatakan, bahwa salah satu kekuatan institusi yang terpenting adalah memberi kemudahan untuk terluput dari bencana (survival) dan perluasan mitos bebas nilai merupakan kegunaan dalam mempertahankan baik kohesi maupun otonomi dari universitas modern pada umumnya dan ilmu sosial yang lebih baru pada khususnya.

Harapan Weber dengan prinsip bebas nilai, kelihatannya semacam "Fair Trade Act" untuk mengekang kompetisi. Hal ini menyatakan salah satu fungsi laten dari doktrin bebas nilai untuk membawa perdamaian pada masyarakat akademis, dengan mereduksi kompetisi bagi para mahasiswa, dan sebaliknya hal ini mengarahkan pada kita, pada beberapa kekhususan institusional dari universitas-universitas Jerman pada waktu zaman Weber.

Maksud Weber dalam mengajukan doktrin "bebas nilai", sebagian merupakan suatu usaha untuk menegakkan modus vivendi diantara para akademisi yang komitmen pada politik yang kerap kali terlibat dalam posisi yang sengit.

Berdasarkan latar belakang sejarah ini, doktrin bebas nilai merupakan suatu usul senjata. Akibatnya, bila kita berdiam diri terhadap pandangan politis kita, maka kita akan mampu menentukan pekerjaan kita. Strategi Weber adalah melindungi integritas dan kebebasan bertindak, baik negara sebagai instrumen dari policy nasional Jerman maupun bagi universitas sebagai penjelmaan tradisi Barat tentang Rasionalisme.

Sebelum jatuhnya bom atom di Hiroshima, ahli-ahli fisika juga berbicara mengenai ilmu yang bebas nilai. Tetapi pada dewasa ini, banyak diantara mereka yang tidak begitu yakin lagi mengenai doktrin bebas nilai itu (William Feiglman, Ed., 1976).

IV

Hadirin yang saya muliakan.

Dalam pandangan tradisional, teori merupakan jumlah keseluruhan proposisi-proposisi tentang suatu subyek. Proposisi-proposisi itu satu sama lain terjalin, sehingga terbentuk semacam susunan di mana hanya beberapa saja menjadi proposisi dasar. Semakin sedikit proposisi dasarnya teori itu semakin kuat.

Tujuan teori tradisional itu membangun konsep-konsep umum mengenai semua hal, yang nampak dalam cita-citanya selalu ingin memperoleh "a universal systematic science".

Disamping itu teori tradisional tsb bersifat "netral", karena sebagai alat yang dapat dipakai untuk menganalisa secara teknis setiap hal dan keadaan termasuk masyarakat. Penetralkan ini sejiwa dengan cita-cita Descartes, perintis lahirnya teori tradisional. Filsafat Descartes memakai cara kerja ilmu pasti atau positivisme yang membangun filsafatnya dengan cara kerja ilmu alam. Menurut positivisme, ilmu pengetahuan mencakupi dirinya sendiri, berdikari dan bebas.

Begitu pula, teori tradisional memandang fakta secara obyektif, artinya membiarkan fakta sebagai apa adanya, tidak diubah dan tidak dibentuk oleh kesadaran manusia yang nampak dalam pendiriannya, bahwa penelitian obyektif tidak boleh dicampur adukkan dengan pengaruh nilai-nilai, karena itu nilai-nilai itu harus dihapuskan dari penelitian.

Menurut Beltran: untuk mengatakan bahwa seseorang itu obyektif (berkat keahlian menggunakan alat-alat pengukuran yang canggih) juga persis, dapat berarti bahwa ia cukup

subyektif dalam membutakan dirinya terhadap kenyataan; nilai-nilai yang dianutnya sendiri masuk ke dalam cara penelitian yang dilakukannya. (Everett M. Rogers, 1985).

Menurut Wright C. Mills (1959), sosiolog seharusnya tidak hanya menerima fakta-fakta, tetapi menafsirkannya kembali makna dan nilai fakta-fakta yang dianalisisnya, dan yang terpenting harus melihat bagaimana struktur suatu masyarakat berkaitan dengan keseluruhan perubahan lebih luas yang sedang terjadi. Ia menimbulkan permasalahan kultural. Karena itu ilmu-ilmu sosial harus bisa meraba keresahan dan harapan macam apa yang terjadi dan timbul dari permasalahan itu yang untuk mengungkapkannya dibutuhkan imajinasi.

Bagi Peter L. Berger (1985), perspektif sosiologis itu meliputi suatu proses "melihat tembus" serambi struktur sosial, karena misteri sosial berada di balik serambi tersebut. Cara sosiologi melihat di balik "serambi struktur sosial akan membantunya membuat penalaran kita lebih jelas.

Persepsi kenyataan di balik serambi itu menuntut usaha intelektual yang tidak kecil.

Sosiolog berkali-kali didorong oleh logika disiplin itu sendiri untuk mengikis kepalsuan (debunking) suatu sistem sosial yang dipelajarinya.

Kecenderungan membongkar ini tidak perlu karena temperamen sosiolog itu sendiri.

Dasar berpijaknya teori tradisional hanya pada ilmu pengetahuan, memisahkan teori dan fakta, tidak memikirkan peran dan aplikasi praktis dari sistem konseptual atau teoritisnya. Teori tradisional hanya berfikir "ilmu demi ilmu".

Teori yang demikian tidak mungkin menjadi teori emansipatoris. Emansipasi, merupakan persoalan yang selalu relevan sepanjang zaman, juga bagi negara-negara berkembang. Jika pembangunan dimaksudkan sebagai proses emansipasi, pembebasan, dari kealiamahan manusia juga rintangan yang dibuat manusia

sendiri maka teori emansipatoris kiranya juga relevan bagi pembangunan.

Salah satu syarat agar teori dapat menjadi emansipatoris, ia harus kritis, sangat menghormati ilmu pengetahuan, tetapi tidak mendewakannya. Teori bukan demi teori, tetapi untuk diamalkan bagi kebebasan, kesejahteraan dan kebahagiaan manusia, mencegah dan mendorong masyarakat menuju ke perbaikan.

Dewasa ini, ilmu-ilmu sosial ingin mencapai keobyektifan ilmiah, tetapi justru pada sikapnya yang netral, bebas nilai terhadap fakta sosial yang dihadapinya.

Sikap yang demikian tidak akan mempengaruhi apa-apa bagi masyarakat yang justru perlu diperbaikinya. Ilmu-ilmu sosial dengan bersikap bebas nilai sebenarnya memperlakukan fakta sosial yang hidup dan kompleks sebagai benda alami yang tidak sadar seperti dalam ilmu alam, sehingga ilmu sosial hanya merupakan alat analisa yang tidak mempunyai pendirian apa-apa terhadap fakta sosial, tanpa menanyakan apa ada kepentingan yang terselubung di balik fakta itu. Karena itu seharusnya kritis, menghindari diri untuk diperalat fakta sosial yang dihadapinya (Sindhunata, 1982).

IV

Hadirin yang saya muliakan.

Apakah teori yang terutama berhubungan dengan data peradaban Barat dapat diuniversalisasikan begitu saja? Oleh Rogers (1985) dinyatakan, bahwa Portes dalam *The Factorial Structure of Modernity* (1963), mengkritik pemikiran Barat serta penyalahan pribadi itu. Sebab ia yakin, terdapat arus bawah etnosentris yang mendasar dalam mencirikan manusia modern di negara-negara berkembang. Banyak ekonom yang bersikeras, bahwa disiplin mereka merupakan seperangkat teori yang sah secara universal, dapat

diterapkan dimana saja. Begitu pula Gunnar Myrdal dalam "Asian Drama" (1968) menyatakan, para teoritis ekonomi, lebih dari ilmu sosial lainnya, sejak lama merasa yakin telah mencapai preposisi dan menyatakan sah bagi segala waktu, tempat dan kebudayaan manapun. Lebih-lebih Lerner dalam "International Cooperation and Communication in National Development" menyatakan "Sesungguhnya model Barat merupakan dasar yang tidak terhindarkan bagi perencanaan pembangunan di Asia, sebab memang tidak ada model lain yang dapat membantu tujuan ini".

Tetapi Inayatullah dalam "Western, Asia or Global Model of Development (1976) menyimpulkan Teori pembangunan Barat bukanlah suatu kerangka intelektual yang tepat karena ia terlalu menekankan faktor-faktor internal negara-negara masyarakat Asia dan menolak faktor-faktor eksternal sebagai penyebab Keterbelakangan".

Model-model pembangunan Barat mengasumsikan, bahwa sebab utama keterbelakangan itu disebabkan faktor-faktor intern negara-negara yang terbelakang, bukan karena sebab dari luar, bukan dari negara maju atau bahkan bukan dari kedua-duanya secara bersamaan.

Etnosentrisme intelektual memang kerap kali dijumpai pada karya orang Barat. Apalagi kalau diingat pendapat Hofstee dalam bukunya "Development and Rural Social Structure" (1968) yang mengatakan, bahwa ilmu pengetahuan itu adalah produk kehidupan sosial dalam masyarakat di mana ia berada, dari ilmu terlebih benar lagi dalam hal ilmu-ilmu sosial "Bahkan Rogers" dalam "Modernization Among Peasant : The Impact of Communication" (1969) mengatakan orang harus bisa membayangkan bagaimana berbedanya ilmu-ilmu sosial jika ilmu-ilmu sosial tersebut dilahirkan oleh orang-orang Kenya, Jepang atau Bolivia".

Karena itu dapat difahami, jika Amerika Serikat merancang

dan membangun ilmu-ilmu sosial melalui filsafat, obyek dan metode yang cocok dengan lingkungan, struktur, kebudayaan, ekonomi dan politiknya sendiri (E. Rogers, Ed. 1985).

Adanya etnosentrisme intelektual mengakibatkan timbulnya pemikiran-pemikiran indigenisasi ilmu pengetahuan, yaitu penyesuaian asumsi dasar teori ilmu sosial dengan sistem nilai lokal/nasional serta merekonstruksikan isi teori tersebut atas dasar sistem kognitif lokal/nasional (Ignas Kleden, 1987).
Terutama dalam ilmu sejarah, pengingkaran-pengingkaran yang menjiwai historiografi kolonial, menimbulkan rangsangan untuk membangkitkan kesadaran sejarah sebagai Resonansi kesadaran kehidupan politik merdeka di satu pihak, dan sebagai ekspresi aspirasi nasional untuk menemukan kembali identitasnya di pihak lain.

Historiografi kolonial mengenai abad ke XIX memandang sejarah Indonesia sebagai sambungan sejarah Belanda, karenanya menurut pandangan itu, rakyat Indonesia tidak memainkan peranan yang aktif. Dengan demikian sejarah Indonesia abad ke XIX untuk sebagian besar hanya merupakan sejarah kolonial saja. Sejarah kaum petani di Indonesia, mengandung arus-arus yang mengalir terus sampai ke zaman modern. Abad ke XIX dan ke XX didalamnya tampak tanda-tanda tentang adanya pergolakan petani dan revolusionisme agraris yang aktif. Tetapi oleh ahli-ahli sejarah kolonial dilupakan, bahwa pemberontakan-pemberontakan itu merupakan gerakan-gerakan sosial dalam arti luas, karena dianggap sebagai pra politis dan tidak ada hubungannya dengan peristiwa-peristiwa sejarah yang besar.

Kita harus menembus lapisan permukaan peristiwa-peristiwa nasional di atas pentas utama sejarah kolonial dan menjadikan kekuatan-kekuatan yang mendasarinya yang bekerja dalam masyarakat kolonial. Karena itu kita harus meninggalkan pendekatan historiografi kolonial, yang hanya menyerap fakta-fakta mengenai peristiwa-peristiwa dan episode-

episode politik yang besar, harus menembus sampai ke tingkat faktor-faktor yang mengkondisikan peristiwa-peristiwa itu. Dilihat dari sudut pandangan ini peristiwa-peristiwa sejarah yang unik menjadi manifestasi kekuatan-kekuatan yang lebih fundamental yang menampakkan diri di permukaan.

Begitu pula, pendekatan historiografis kolonial tidak memperhatikan aspek-aspek struktural sejarah Indonesia. Pendekatan struktural terhadap sejarah Indonesia akan menghilangkan Belanda sentris. Kita perlu mengadakan rekonstruksi kerangka yang Indonesia sentris (Sartono, 1984 ; 1987).

Adanya kenyataan, bahwa teori-teori ilmu sosial biasanya mengandung motif-motif laten maka indigenisasi ilmu pengetahuan perlu ditanggapi dengan serius. Dalam hal ini ketajaman intelektual memang sangat dibutuhkan meskipun masih ada masalah-masalah yang perlu diatasi.

V

Hadirin yang saya muliakan.

John Seeley, seorang sejarawan Inggris pernah mengatakan, bahwa dari belajar sejarah orang akan menjadi bijaksana lebih dulu. Karena itu dengan mempelajari sejarah modernisasi Barat, kita akan mendapat ajaran-ajaran penting, baik mengenai segi positifnya maupun segi negatifnya, sehingga dengan demikian eksesnya dapat dihindari atau paling tidak dapat diperkecil.

Bila pada awal kelahiran zaman modern, gerakan kebangkitan Hellenisme (kebudayaan yang berkembang pada zaman Yunani Kuno dan Romawi yang pangkal utama alam pikirannya adalah rasionalitas individualitas serta imanensi menjadi acuan pemikiran) sekedar suatu usaha untuk melepaskan diri dari kemutlakan Theologi, maka didalam perkembangannya terdapat kecenderungan menolak agama dan akhirnya menolak Tuhan sendiri.

Hellenisme terungkap didalam sekularisme yang membawa serta berkembangnya atheisme yang bersifat deterministik (A.M.V. Pranarka, 1985). Tetapi adalah suatu kekeliruan untuk memandang revolusi ilmu secara langsung mengakibatkan sekularisasi. Ahli ilmu pengetahuan yang terkenal seperti Galileo dan Newton adalah orang-orang yang berbakti. Sesungguhnya Newton berfikir bahwa hukum-hukum ilmu alam yang dirumuskannya menjadikan eksistensi Tuhan itu lebih pasti, karena hanya seorang "Supreme Intelligence" yang dapat menciptakan alam semesta yang teratur dan rasional secara menakjubkan.

Kebanyakan kaum ilmuwan adalah Deis, yang percaya pada Tuhan seperti "Supreme Intelligence" nya Newton, yang telah merencanakan dan menciptakan alam semesta yang teratur dengan baik secara menakjubkan. Tetapi setelah penciptaan, Tuhan membiarkannya untuk berjalan sesuai hukum-hukumnya. Tuhan tidak mencampuri ciptaanNya lagi, begitu pula tidak menyatakan diriNya pada umatNya.

Semua pengetahuan manusia mengenai Tuhan, datang melalui ciptaanNya dengan cara penyelidikan rasional. Karena itu manusia tidak membutuhkan agama yang resmi dan didasarkan atas kepalsuan.

Implikasi dari sekularisme abad ke 18 berkembang dengan cara yang makin radikal. Ilmu juga bergerak ke tujuan-tujuan yang kadang-kadang merugikan agama, meskipun beberapa ilmuwan yang utama seperti Louis Pasteur dan Gregor Mendel adalah orang-orang percaya yang taat.

Disamping itu dalam abad ke 19 berkembang apa yang dinamakan "Scientism" yang menganggap, bahwa ilmu pengetahuan yang mempunyai kunci pada kebenaran dan apa saja yang tidak ilmiah adalah palsu. Dalam abad ke 19, teknologi industri berkembang, sehingga teknologi memberi kepercayaan pada manusia, bahwa tergantung pada Tuhan itu tidak ada artinya.

Abad ke 19 juga melahirkan 3 sistem berfikir yang revolusioner, dari Karl Marx, Charles Darwin, dan Sigmund Freud. Meskipun masing-masing berbeda pendapat dalam beberapa hal, tetapi mereka bersama-sama mengambil bagian dalam materialisme. Eksistensi manusia digambarkan masing-masing menurut kebutuhan ekonomi, evolusi biologis dan dorongan seksual.

Ketiga gerakan ini memberi dorongan lebih lanjut kepada Humanisme Sekuler dalam arti ketiga-tiganya tidak memerlukan Tuhan. Marx adalah ateis yang militan, Darwin tidak menolak Tuhan tanpa keadaan terpaksa, tetapi semakin tua ia semakin skeptis, dan Freud menganggap kepercayaan agama sebagai ilusi neurotik, karena semua agama adalah hasil dari neurosis.

Kalau dibandingkan Humanisme pada zaman Pencerahan dan yang terdapat dalam abad ke 19, maka Humanisme abad Pencerahan itu selalu mempunyai kebanggaan pada moralitas, sedangkan Humanisme abad ke 19 mengandung suatu dorongan jahat untuk meniadakan dan menghancurkan. Seperti apa yang dikatakan oleh Nietzsche, sekali Tuhan ditolak, maka manusia akan memperoleh kebebasan yang sebenarnya, hanya dengan menolak semua kendala moral pada dirinya sendiri dan menciptakan moralitasnya sendiri. Hanya kehendak manusialah yang berdaulat. (James Hitchcock, 1982).

Humanisme sekuler telah menjadi gerakan yang berhasil dan sangat berpengaruh. Gerakan ini memproklamasikan ketidaktergantungan manusia pada Tuhan dan menyatakan kebebasannya untuk membentuk hari depannya sendiri. Filsafatnya menyatakan: "tidak ada dewa/Tuhan yang menyelamatkan kita. Kita harus menyelamatkan diri kita sendiri," biasa terdengar dalam kehidupan, kita sehari-hari. Idenya telah meluas secara mendalam pada peradaban Barat, yang pada dewasa

ini merupakan model yang dominan untuk pandangan bagi dirinya sendiri dan dunianya.

Menurut James Hitchcock, Humanisme Sekuler itu merupakan suatu pengkhianatan terhadap Humanisme yang benar, yaitu kepercayaan bahwa kemajuan manusia dan pelaksanaannya yang sejati harus berdasarkan pada pengakuan, bahwa manusia itu tergantung pada Tuhan.

Pada tahun 1933, the American Humanist Association telah mengeluarkan suatu, Humanist Manifesto, suatu credo bagi gerakan Manifesto ini mempersamakannya sebagai sesuatu yang "Religius" yang antara lain menyatakan :

"alam semesta itu ada dengan sendirinya".

"memandang realisasi yang sempurna kepribadian manusia merupakan tujuan kehidupan manusia"

"manusia akhirnya menjadi sadar, bahwa ia sendirilah yang bertanggung jawab untuk realisasi dunia dan impiannya, dan di dalam dirinya ada kuasa untuk mencapainya.

Penyusun Humanist Manifesto" 1933, diantaranya adalah John Dewey, tidak menolak eksistensi Tuhan. Tetapi keyakinan dari dokumen ini secara menyeluruh adalah untuk menolak, bahwa kepercayaan pada Tuhan dapat mempunyai akibat praktis. Manusia harus hidup seolah-olah Tuhan tidak ada. Dengan demikian, Humanisme Sekuler itu tidak secara ketat merupakan ateisme, meskipun kebanyakan humanis adalah ateis.

Disamping itu humanis modern percaya bahwa nilai-nilai moral itu tidak mempunyai jaminan supernatural. Hal ini berarti penolakan terhadap moralitas. Hanya moralitas yang timbul dari pengalaman manusia yang berkesinambungan yang diakui.

Sesungguhnya Manifesto ini mewakili kepercayaan Dewey, sehingga mampu untuk menyebar secara luas dan strategis.

Empat puluh tahun kemudian, tersusun Humanist Manifesto, 1973, yang kepercayaannya antara lain menyatakan :
" . . . kita tidak dapat menemukan keperluan-keperluan yang bersifat ketuhanan untuk species manusia. Manusia bertanggung-jawab mengenai apa yang akan terjadi. Tidak ada dewa/Tuhan yang akan menyelamatkan kita. Kita percaya nilai-nilai moral berasal dari sumber pengalaman manusia. Etik adalah otonom dan situasional tidak memerlukan sanksi teologis dan ideologis. Hak untuk mengendalikan kelahiran, aborsi dan perceraian, harus diakui.

Humanist Manifesto 1973, dibandingkan dengan Humanist Manifesto, 1933, secara substansial, tidak ada hal yang baru, tetapi lebih berani menentang agama tradisional. Kalau Humanist Manifesto, 1933, tidak bersuara mengenai masalah seks, tetapi Humanist Manifesto, 1973 secara terang-terangan mengakui sebagai kunci konflik dengan orang-orang yang percaya pada agama (James Hitchcock, 1982).

Diantara para penandatanganan Humanist Manifesto, 1973 adalah Gunar Myrdal dan Sidney Hook yang pernah datang ke Indonesia berwawancara dengan beberapa tokoh, serta dengan terus terang mengakui bahwa ia adalah seorang sekuler.

Humanist Manifesto, 1973 merupakan dokumen dimana manusia menyingkirkan eksistensi Tuhan, merupakan usaha manusia menghilangkan fikiran dan hidupnya seolah-olah Tuhan tidak ada, atau tegasnya, merupakan pemberontakan manusia terhadap Sang Pencipta (Edward Rowe, 1985)

Dipandang secara kritis, Humanisme merupakan protes terhadap prosedur dehumanisasi dan depersonalisasi pada ilmu-ilmu alam dan metafisika absolut.

Kepentingannya yang terutama adalah pada logika dan

epistemologi serta polemiknya secara khusus ditujukan pada asumsi intelektual dari logika tradisional yang secara sistematis tidak mengakui sisi psikologis dari pengetahuan dan pengaruh kemauan-kemauan, emosi-emosi, kebutuhan-kebutuhan, bias dan kepribadian dari proses-proses berfikir manusia (Encyclopedia of the Social Sciences, 1963).

Di dunia Barat untuk beberapa abad yang lalu Humanisme yang memandang manusia seutuhnya, baik dari segi yang rasional, maupun yang non-rasional, merupakan bentuk pemikiran yang penting. Tetapi karena makin berurat berakarnya sekularisme dalam kebudayaan Barat, abad Humanisme makin diganti oleh abad sekularisme.

Humanisme modern karena sifatnya yang sekuler telah kehilangan pengertian Humanisme klasik, sehingga studi mengenai humanisme harus dibedakan dari Humanisme modern. Begitu pula dengan Humanitarianisme yang memperlakukan manusia secara manusiawi. Humanisme modern sejak abad ke 19 secara cepat mundur ke sekularisme materialistik, karena beberapa alasan :

Pertama, karena perkembangan ilmu yang secara sembarangan menyingkirkan tiap konsep dari Sang Pencipta maka ada potensi yang mengsekulerkan.

Kedua, karena popularitas teori evolusi yang memberi suatu totalitas pada gambaran sekuler mengenai dunia. Setiap hal itu dipandang sebagai produk sesuatu permulaan yang impersonal, sehingga secara mudah menempatkan non-eksistensinya Tuhan.

Sekularisme dalam analisa terakhir, membawa pada penghapusan kehidupan manusia.

Determinisme alamiah dan teknologi yang makin berkembang, bersama-sama telah mengikis pandangan tradisional, bahwa manusia menurut gambar Tuhan menggantikannya dengan

pandangan yang Relativistik dan dehumanistik (John W. Whitehead, 1986).

VI

Hadirin yang saya muliakan.

Pertumbuhan semangat Pencerahan yang makin menjadi terlepas dari teologi dan agama serta menekankan pada otonomi dan kebebasan ilmu pengetahuan terhadap teologi dan agama, mencerminkan perkembangan yang sifatnya fundamental.

Proses sekularisasi berkembang menjadi sekularisme (van der Bercken, 1968), bukan sekedar pemisahan antara urusan agama dengan urusan negara, masyarakat dengan pengetahuan, akan tetapi menjadi sikap dasar yang menolak agama, bahkan lebih jauh lagi yaitu menolak Tuhan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu sendiri.

Dengan demikian sekularisme melahirkan ateisme yang menjadi satu bagian dari perkembangan alam fikiran abad XIX dan abad ke XX di Eropa (A.M.W. Pranarka, 1985).

Pada dewasa ini ateisme tidak lagi merupakan gejala yang ditimbulkan oleh beberapa individu yang mementingkan hal-hal yang dianggap tabu oleh masyarakat tetapi yang menonjol adalah adanya golongan mayoritas yang menyatakan diri sebagai kaum ateis serta menganggap segala bentuk kepercayaan sebagai musuh akal yang dianggapnya sebagai satu-satunya kriteria dari kebenaran.

Untuk pertama kalinya dalam sejarah, manusia berusaha menegakkan sesuatu peradaban yang benar-benar bersifat "alamiah" dengan tanpa menghiraukan segala jenis transendensi, seperti terdapat dalam karya-karya kaum ateis yang pada dasarnya merupakan kritik terhadap agama dan kepercayaan.

Kaum ateis dapat digolong-golongkan sebagai berikut:

- a. Ateisme neurotis.
- b. Ateisme marxis
- c. Ateisme rasionalis.
- d. Ateisme eksistensialis
- e. Ateis atas nama nilai

Dengan menerapkan psikoanalisa, pada berbagai ateisme modern" abad ke 18 dan terutama abad ke 19, maka ateisme rasionalis merupakan bentuk yang khas dari ketidakpercayaan pada agama pada masa itu.

Atas nama ateisme rasionalislah kaum Freemason dan kaum liberal berjuang melawan Gereja dan demi sekularisasi lembaga-lembaga umum, terutama sekolah-sekolah.

Agama dipandang sebagai kegelapan, sedangkan sains dipandang sinonim dengan cahaya. Karena itu dengan sendirinya nampaknya tidak mungkin ada, "koeksistensi damai" antara keduanya.

Pada dewasa ini umumnya ateisme rasionalis, jauh kurang dogmatis dibanding dengan satu abad yang lalu.

Hanya sedikit diantara mereka yang percaya, bahwa fikiran saja akan cukup untuk mencapai tujuan jiwa manusia.

Sebagian dari kaum rasionalis lebih agnostis dari pada kaum ateis, mereka tidak selalu menolak tatanan supernatural.

Rostand, seorang biolog dalam buku yang berjudul "What I Believe", secara jujur mengaku, bahwa keyakinan Rasionalisnya merupakan kepercayaan.

Dalam penolakannya terhadap segala dogmatisme ilmiah, ia mengatakan, "Bahkan dalam sanubari saya sama sekali tidak berfikir bahwa orang-orang yang kepercayaannya berbeda dengan saya mempunyai penilaian yang lebih buruk maupun melupakan bahwa betapa rapuh dan tidak pastinya pembentukan pendapat-pendapat seseorang".

Tetapi Rostand membedakan dirinya dengan para pemeluk agama yang saleh, sama sekali tidak ragu-ragu, bahwa fikiran

adalah satu-satunya alat manusia untuk mencapai kebenaran. Tentu saja fikiran tidak sempurna, tetapi hanya inilah yang dipunyai manusia.

Berdasarkan kepercayaan biologisnya, Rostand meyakinkan orang lain, bahwa hanya ada satu tingkat perbedaan antara kita dan binatang, yakni suatu perbedaan kuantitas dan bukannya kualitas . . . kita tercipta dari bahan yang sama, zat yang sama dengan binatang.

Rostand merasa dirinya sama dengan segala makhluk betapapun hinanya makhluk itu.

Hal yang menonjol dan khas dari kejujuran intelektual Rostand adalah setelah mengakui kepercayaannya terhadap transformisme dia merasa wajib untuk menambahkan: "Kita tidak berhak memandang evolusi organis sebagai suatu kepastian bila kita kekurangan bukti tetapi bila orang lain dapat benar-benar percaya kepada evolusi, hampir tidak mungkin bagi seorang ahli biologi untuk tidak mempercayainya".

Bagi Rostand dan semua orang yang percaya kepada rasionalisme, hanya pengetahuan ilmiah yang memenuhi syarat untuk mencapai kebenaran, bahkan meskipun hanyalah merupakan kebenaran parsial.

Pengkritikan terhadap rasionalisme, bukan karena kepercayaannya kepada fikiran, melainkan karena rasionalisme menganggap fikiran benar-benar berkuasa, mempunyai obyektivitas yang mutlak dan tanpa dipengaruhi oleh hal-hal lain. Konsep fikiran semacam itu tidak terbukti secara eksperimental. Manusia adalah suatu kesatuan, dalam kehidupan roh dan jiwanya, kita menemukan adanya suatu interaksi dari segala pembawaannya tidak hanya merupakan hal yang wajar, tetapi juga pantas bila fikiran dipengaruhi perasaan, apabila tidak demikian halnya, fikiran benar-benar akan menjadi dingin dan tidak mampu mengerti kenyataan manusiawi (Ignace Lepp, 1985).

VII

Hadirin yang saya muliakan.

Pada abad ke-20, tantangan yang paling besar adalah impersonalisme.

Impersonalisme merupakan gerakan logis dari kebudayaan pada dewasa ini. Gerakan ini mereduksi manusia, sehingga hanya merupakan gigi roda di dalam mesin masyarakat teknologis. Hal ini merupakan penolakan manusia seutuhnya (James Hitchcock, 1982).

Keutuhan martabat manusia sebagai produk modernisasi di dunia Barat, sungguh bertentangan dengan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia.

Presiden Soeharto dengan tegas mengatakan, bahwa pembangunan nasional pada hakekatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia. Dengan demikian, maka pembangunan pada dasarnya bukan terletak dalam perwujudan segi fisik teknologi dan ekonominya semata-mata, bukan saja terletak dalam segi rohani dan mental spiritualnya saja melainkan dalam pengembangan seluruh dimensi serta segi yang dibutuhkan dalam keserasian dan keselarasan dan terwujudnya manusia yang dewasa berkepribadian. Kualitas manusia diusahakan untuk ditingkatkan sebagai sumber insani.

Hal ini menunjukkan, bahwa martabat manusia merupakan tolok ukur, sedangkan tujuan pembangunan adalah meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia secara menyeluruh (Moekti Ali, 1988)

Dengan demikian, Indonesia menjelang era tinggal landas, yang sering diidentikan dengan masuknya negara kita sebagai kategori negara industri.

Hal ini disebabkan mulai kuatnya kerangka dan landasan untuk masuk negara industri, meskipun sektor industri masih tetap ditopang oleh sektor pertanian (Willy A. Waroka, 1989).

Ilmu-ilmu sosial yang pada waktu lalu hanya memainkan peranan pembantu, maka sekarang diberi kepercayaan sebagai ko-arsitek dari pembangunan nasional (Ignas Kleden, 1987). Karena itu, sebagai insan Pancasila, para ilmuwan sosial dengan ketajaman intelektualnya, tidak hanya mengembangkan ilmunya secara teoritis saja, tetapi lebih-lebih merencanakan segi-segi operasionalnya, sehingga sungguh-sungguh menjadi ko-arsitek pembangunan nasional, dengan menghindarkan ekkses seperti yang terjadi pada modernisasi Barat. Karena acuannya adalah Pancasila, U.U.D '45, G.B.H.N. dan Ketetapan-ketetapan MPR.

Kalau diperhatikan dengan sungguh-sungguh, sejak awal, G.B.H.N, telah memberi corak "kemanusiaan" pada proses pembangunan dengan menempatkan "manusia seutuhnya" sebagai sasaran pembangunan.

Manusia Indonesia yang pada awal pembangunan lebih merupakan kendala, maka selanjutnya diharapkan untuk menjadi sumber insani, tanpa mengorbankan martabatnya. Bahkan segi para ilmuwan sosial, bersama-sama dengan para ilmuwan lainnya tertantang untuk secara kreatif dan inovatif berdasarkan U.U. Pendidikan Nasional melaksanakan pembangunan Nasional.

Pernyataan "mengutamakan manusia" dalam proyek-proyek pembangunan, berarti memberi manusia lebih banyak peluang untuk berperan secara efektif dalam kegiatan pembangunan. Dengan demikian memperkuat manusia mengarahkan kapasitasnya sendiri menjadi subyek yang aktif mengelola sumber daya, membuat keputusan dan mengawasi kegiatan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Pada dewasa ini mulai timbul pemikiran baru pada para ilmuwan sosial yang menganggap, bahwa penilaian dampak sosial itu bukan merupakan penilaian yang paling efektif, tidak memadai. Karena itu harus diperkuat meliputi tiap tahap penting dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Tegasnya, para ilmuwan

sosial tidak hanya menganalisa dan menerangkan saja, tetapi juga membantu mengubah statusquo (Michael M. Cernea, 1988). Dengan demikian dipakai untuk meningkatkan kualitas hidup manusia.

Pada dewasa ini Pancasila sudah merupakan satu-satunya asas bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang memperhatikan hubungan yang bersifat triadik, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama/masyarakat serta hubungan manusia dengan alam/materi. Dengan lain perkataan, Pancasila berisi juga humanitarianisme yang mewadahi konsep manusia yang bermartabat tinggi serta penuh potensi untuk merealisasikan segala aspirasinya sesuai dengan identitasnya, sehingga pemenuhan eksistensinya akan meningkatkan kualitas hidupnya. Karena itu tipe masyarakat yang kita kehendaki masyarakat yang tetap berkepribadian Pancasila, sehingga tidak mengakibatkan ekses seperti yang dialami oleh perkembangan masyarakat industri Barat atau setidak-tidaknya, akibat negatifnya dapat diperkecil (Willy A. Waroka, 1989)

Di Barat, kemakmuran materiil disertai dengan kekosongan spiritual. Misalnya dalam dunia pendidikan Amerika Serikat, sekularisasi makin meningkat. Satu abad sesudah penerimaan Deklarasi Kemerdekaan, mayoritas Penduduk Amerika telah menerima prinsip sistem Sekolah negeri yang bebas, Universal, bebas dari pengawasan dan pendidikan sektarian (pendidikan-pendidikan khusus atau tersendiri dari kelompok agama mana saja), dengan keyakinan demokratis, sebagai suatu "Agama", karena meliputi asumsi-asumsi dasar mengenai manusia, masyarakat dan alam semesta dan karena telah menampilkan diri fungsi agama dalam kehidupan bangsa Amerika.

Menurut Dewey dan teman-temannya yang mempunyai fikiran yang sama "agama" ini menunjukkan pada nilai-nilai

demokrasi dan dari suatu macam humanisme dasar. Nilai ini oleh Dewey diberi label "Religieus". Yang lain-lainnya menyebutnya "spiritual".

Pendidikan agama di sekolah-sekolah negeri dikhawatirkan akan menimbulkan perpecahan, karena adanya pluralisme agama dalam masyarakat (Dale I. Brubaker, 1989).

Di Indonesia meskipun ada pluralisme agama dalam masyarakat, Pendidikan agama di sekolah-sekolah negeri ternyata tidak mengakibatkan perpecahan antara umat beragama, karena menurut U.U. R.I. No. 2/1989, tentang Pendidikan nasional mengenai Dasar, Fungsi dan Tujuannya adalah sebagai berikut:

Pasal 2 : Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan U.U.D. 45.

Pasal 3 : Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional.

Pasal 4 : Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ke-trampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan Kebangsaan.

Akhir-akhir ini, akibat kekosongan spiritual timbul suatu gejala di Amerika Serikat, yaitu dunia Barat sedang berpaling ke Timur, seperti yang terdapat dalam buku Prof. Harvey Cox dari Havard Divinity School: "Turning East"

"Pengaruh keagamaan negara Timur di dunia Barat hampir bukan sesuatu yang baru. Tetapi ada yang baru mengenai situasi dewasa ini. Dalam dasa warsa yang lalu, minat

terhadap filsafat negara Timur kebanyakan terbatas pada kaum intelektual dan umumnya dipusatkan pada ide-ide, tidak pada praktek-praktek kebaktian. Dewasa ini sebaliknya banyak orang non-intelektual terlibat, bahkan mereka tampak lebih tertarik pada praktek-praktek keagamaan yang sesungguhnya daripada ide-ide yang bersifat doktrin. Gelombang keagamaan akhir-akhir ini tampaknya lebih luas dan lebih dalam daripada sebenarnya.

..... faktornya adalah bahwa banyak orang terlibat, bukan hanya sekelompok orang di daerah pinggiran, dan meluasnya minat itu belum adaandingannya sepanjang sejarah keagamaan di Amerika"

Bahkan pengamat sosial, John Naisbit dalam bukunya "Megatrends", mencatat "tersebar luasnya minat terhadap agama-agama Timur sejak tahun 1960-an !!

Begitu pula pantheisme telah menjangkau bidang ilmu. Tahun 1973 Brian Josephson pemenang hadiah Nobel bidang fisika mempertaruhkan reputasi ilmiahnya pada kemungkinan mendapatkan wawasan tentang realitas yang obyektif dengan mempraktekkan teknik-teknik meditasi tradisional Timur.

Fritjof Capra dalam "The Tao of Physics : On Explanation of the Parallels between Modern Physics and Eastern Mysticism", menyampaikan pernyataannya bahwa "kedua dasar ilmu fisika abad ke 20 - teori kuantita dan teori relativitas memaksa kita memandang dunia dengan cara seperti yang dilakukan pemeluk Hindu, Budha atau Tao (Norma 1. Geisler & Yutaka J. Amano, 1986).

VIII

Hadirin yang saya muliakan.

Dalam bahan-bahan mengenai G.B.H.N. yang telah disampaikan oleh Presiden Soeharto kepada M.P.R. 1987-1972 dinyatakan bahwa pengamalan sila Ketuhanan Yang Maha Esa antara lain mencakup tanggung jawab bersama dari semua

golongan dan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk secara terus menerus dan bersama-sama meletakkan landasan moral, etik dan spiritual yang kokoh, bagi pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila.

Begitu pula dalam pidato kenegaraan 15 Agustus 1986, ditambah lagi dengan kata-kata, bahwa "dengan itu kita memberi isi yang positif kepada pandangan kita, bahwa negara Pancasila bukan nyata agama dan bukan negara sekuler".

Pendekatan dalam kedua pidato Presiden tadi merupakan pendekatan yang lebih maju, dibandingkan dengan pendekatan dahulu yang berpusat kepada kerukunan antara umat beragama. Meskipun kerukunan itu penting, tetapi pada dewasa ini kerukunan demi tugas bersama dan tanggung jawab bersama untuk meletakkan landasan moral, etik dan spiritual yang kokoh bagi pembangunan nasional, bagi pengamalan Pancasila menuju tinggal landas. Tugas bersama dan tanggung jawab bersama itu memerlukan fikiran kreatif dan inovatif. Pada fihak lain dapat diterima oleh semua golongan dalam kerangka bersama untuk membangun masyarakat, bangsa, negara dan kebudayaan yang berdasarkan Pancasila (Simatupang, 1988).

Dalam pembangunan nasional termasuk dalam era industrialisasi, yang dituju tidak hanya lahiriah saja, tetapi juga kepuasan batiniah serta adanya keserasian dan kesinambungan antara keduanya. (GBHN). Hal ini akan mencegah terjadinya cultural gap dengan segala implikasinya. Tercapainya era industrialisasi dalam konteks pembangunan itu harus ditinjau dari sudut tahapan-tahapan pembangunan nasional, sejak Pelita pertama sampai sekarang, yaitu Pelita kelima menuju tahap "tinggal landas".

Pada dewasa ini, kita berada dalam tahap Repelita kelima yang mempunyai sasaran meningkatkan bidang industri dan pertanian secara bertahap dalam rangka mencapai struktur ekonomi yang seimbang, yaitu struktur ekonomi dengan titik

berat kekuatan industri yang didukung oleh bidang pertanian yang kuat. Sedangkan sasaran pada akhir Pelita kelima adalah terciptanya landasan yang kuat bagi bangsa Indonesia, untuk tumbuh dan berkembang terus, sehingga dalam Pelita keenam, pembangunan Indonesia dapat memasuki proses tinggal landas untuk memacu pembangunan dengan kekuatan sendiri menuju terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila (GBHN).

Industrialisasi yang pada hakekatnya merupakan proses pembangunan masyarakat, menyangkut peningkatan kualitas serta pendayagunaan potensi manusia Indonesia (Janner Sinaga, 1989).

Dalam hal ini kita akan menghadapi suatu permasalahan, bagaimana teknologi dapat membuat akomodasi terhadap lingkungan di Indonesia, baik yang biologis, maupun yang sosial atau kultural". Pada hakekatnya suatu diskusi mengenai pembangunan dan teknologi yang akan digunakan akan menyentuh soal preferensi nilai-nilai, atau dengan lain perkataan, perencanaan pembangunan senantiasa mempunyai implikasi etis. Kemajuan moral menjadi cita-cita pendekatan manusiawi untuk mencapai kesejahteraan rakyat serta memperbaiki kualitas hidup dengan mewujudkan nilai-nilai dan kemajuan moral yang melembaga.

Perubahan teknologis memerlukan pula perubahan sikap yang memudahkan adaptasi terhadap realitas baru sedemikian rupa sehingga ada kesanggupan untuk menanggapi situasi perkembangan yang serba kompleks (Sartono Kartodirdjo, 1987).

Salah satu faktor psikologi sosial yang penting bagi pembangunan nasional adalah Komitmen Rakyat. Karena itu jangan sampai faktor komitmen terabaikan, tentunya dengan memperhatikan keadaan sosial budaya bangsa Indonesia. Penerimaan idiologi nasional, keinginan untuk menjadi lebih

mobil, menyetujui nilai-nilai baru-semuanya itu berkaitan dengan komitmen terhadap pembangunan nasional. Untuk komitmen terhadap pembangunan nasional dapat digunakan berbagai metode seperti ideologi, perubahan struktural dan aktivitas simbolis. Tanpa komitmen, kemungkinan pembangunan nasional akan gagal, tetapi tidak dapat disimpulkan pula, bahwa dengan komitmen saja akan menjamin keberhasilan pembangunan nasional, karena adanya aspek-aspek lain yang perlu diperhatikan (Robert H. Lauer, 1989). Akhirnya atas kerelaan dan perhatiannya para hadirin yang mulia, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Hadirin yang saya muliakan

Perkenankanlah pada kesempatan ini, saya memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah menganugerahkan pada saya jenjang ilmiah yang tertinggi.

Pernyataan terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Presiden R.I. dan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang telah berkenan mengangkat saya sebagai Guru Besar.

Khusus kepada Saudara Rektor Prof. dr. Moeljeno S. Trastotenojo beserta saudara Pembantu-pembantu Rektor, yang pada waktu kepemimpinannya, seluruh proses dan pengulangan sebagai Guru Besar telah dimulai, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Kepada Senat Universitas dan Dewan Guru Besar Universitas Diponegoro, begitu pula Senat Fakultas, para staf pengajar dan tenaga administratif F.I.S.I.P, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Kepada para Guru Besar Fakultas H.E.S.P. Universitas Gajah Mada, para guru S.D, S.M.P dan S.M.A yang telah mendidik saya, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Suatu kenangan khusus yang ta'akan terlupakan bagi Bapak Prof. dr. Widagdo dengan staf, saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Kepada ayah dan ibu yang telah menghadap Tuhan, terima kasih yang tak terhingga saya sampaikan, atas segala kasih, pengorbanan dan doa-doanya.

Kepada Istri dan anakku yang kekasih, aku sampaikan terima kasihku yang tak terhingga atas kasih, kesabaran, dorongan dan doa-doamu.

Akhirnya terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Panitia, yang telah membantu saya untuk penyelenggaraan pengukuhan Guru Besar, sehingga berjalan dengan baik. Begitu pula saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada hadirin atas perhatiannya terhadap pengukuhan Guru Besar Saya.



Riwayat Singkat Pendidikan dan Jabatan



- I. Nama : Hartojo
Tempat dan tanggal lahir :
Klaten 19-12-1927
Nama istri :
R. Ay. Moektiastoetie
Nama anak :
Indira Christiani Hartojo Putri

II. Pendidikan April 1957

Lulus Fakultas H.E.S.P Uni-
versitas Gadjah Mada,
Jurusan : Hubungan Interna-
sional.

III. Jabatan 1958-1961

Guru S.M.A. Surakarta -
Dosen Luar Biasa pada bebe-
rapa P.T.S

1962-1969

Dosen F.H.P.M. Universitas
Diponegoro

1969-sekarang

Dosen F.I.S.I.P. Universitas
Diponegoro - Dosen Luar
Biasa pada beberapa P.T.S

1976-1977

Dekan Fakultas Sosial & Poli-
tik Universitas Diponegoro

1983-1985

Dekan FISIP Universitas
Diponegoro

1986-1989

Dekan FISIP Universitas
Diponegoro.

Daftar Pustaka

- A.M.W. Pranarko, Sejarah Pemikiran tentang Pancasila, C.S.I.S., Jakarta, 1985.
- Berger, Peter L., Facing Up to Modernity -- Excursion in Society, Politics and Religion, Penguin Books, 1979.
- ..., Humanisme Sosiologi, Inti Sarana Aksara, Jakarta, 1985
- Brubaker, Dale L., Ed., Social Studies in a Mass Society, International Texbook Co., U.S., 1969.
- Cernea, Michael M., Mengutamakan Manusia di Dalam Pembangunan -- Variabel-variabel Sosiologi di Dalam Pembangunan Pedesaan, U.I. Press, 1988.
- Feigelman, William, Ed., Sociology Full Circle -- Contemporary Readings on Society, Second Edition, Praeger Publishers, New York, 1976.
- Geisler, Norma L., & Amano, Yutaka J., Reinkarnasi, Gandum Mas, Malang, 1986.
- Hitchcock, James, What is Secular Humanism? -- Why humanism Become Secular, and How it is Changing Our World, Servant Books, Ann Arbor, Michigan, 1982.
- Ignas Kleden = Sikap, Ilmiah dan Kritik Kebudayaan, LP3ES, Jakarta, 1987.
- Kinloch, Graham Charles, Sociological Theory, Its Development and Major Paradigms, Mc. Graw-Hill, Inc. 1977.
- Lauer, Robert H., Perspektif Tentang Perubahan Sosial, Edisi Kedua, Bina Aksara, Jakarta, 1989.
- Lepp, Ignace, Ateisme Dewasa Ini -- Potret Kegagalan Manusia Modern, Shalahudin Press, Yogyakarta, 1985.

- Louis Leahy SJ., Aliran-aliran Besar Ateisme : Tinjauan Kritis, Penerbit Kanisius & BPK, Gunung Mulia Jakarta, 1985.
- Mills, Wright C, The Sociological Imagination, Oxford University Press, New York, 1959.
- Musa Asy'arie dkk. Ed., Agama Kebudayaan dan Pembangunan Menyongsong Era Industrialisasi. IAIN Sunan Kalijaga Press, Yogyakarta, 1988.
- Myrdal, Gunnar, Bangsa-bangsa Kaya dan Miskin, Gramedia, Jakarta, 1980.
- Naisbitt, John, Megatrends, Warner Books, New York, 1982
- O'Dea, Thomas F., Sosiologi Agama : Suatu Pengenalan Awal, CV Rajawali, Jakarta, 1985.
- Robertson, Roland, Ed., Agama : dalam Analisa dan Perspektif dan Interpretasi Sosiologis, CV - Rajawali, Jakarta, 1989.
- Rogers, Everet M, Ed., Komunikasi dan Pembangunan Perspektif Kritis, LP3ES, 1985.
- Rowe, Edward, New Age Globalism -- Humanist Agenda for Building A New World Without God, Growth Publishing, Virginia, 1985.
- Sartono Kartodirdjo, Kebudayaan Pembangunan Dalam Perspektif Sejarah, Gadjah Mada University Press, 1987.
- _____, Pemberontakan Petani Banten 1888 -- Kondisi, Jalan Peristiwa dan Kelanjutannya = Sebuah Studi Kasus Mengenai Gerakan Sosial di Indonesia, Pustaka Jaya, Jakarta, 1984.
- Sindhunata, Dilema Usaha Manusia Rasional -- Kritik Masyarakat Modern oleh Max Horkheimer dalam Rangka Sekolah Frankfurt, Gramedia, Jakarta, 1987.

- Whitehead, John W., The End of Man, Grossway Books, Illinois, 1986.**
- Willy A. Karamoi, Dalam Era Industrialisasi : Mencari Pola Komunikasi Budaya yang Berbudaya Jatidiri - disampaikan dalam Simposium Nasional, Peranan Komunikasi Sosial dalam Era Industrialisasi, Unisri, Solo, 1989.**
- Yanner, Sinaga, Pembinaan dan Pengembangan Pers/Media Massa Nasional dalam Era Industrialisasi - disampaikan dalam Simposium Nasional, Peranan Komunikasi Sosial dalam Era Industrialisasi, Unisri, Solo, 1985.**
- Encyclopaedia of The Social Sciences, Fifteenth Printing, The Mac Millan Co, New York, 1963.**
- Seri Esensia, Agama dan Kekerasan, Kelompok Studi Proklamasi, Jakarta, 1985.**